

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku – buku

- A. Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat (Dulu, Kini dan Akan Datang)*. Penerbit Pelita Pustaka Jakarta 2009
- A.P Parlindungan, *Bunga Rampai Hukum Agraria Serta Landreform*, Bandung, 1989
- A.P Parlindungan, *Bunga Rampai Hukum Agraria Serta Landreform*, Bandung, 1989
- Abdurrahman, *Aneka Masalah dalam Praktek Penegakan Hukum di Indonesia*, Alumni Bandung, 1980
- Arie, S., Hutagalung, *Perlindungan Pemilikan Tanah dari Sengketa Menurut Hukum Tanah Nasional*, Tebaran Seputar Masalah Hukum Indonesia, 2005.
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia ( Hukum Tanah Nasional)*, Djambatan Jakarta. 1999
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria ,Himpunan Pertaturan Peraturan Hukum Tanah* .Djambatan Jakarta, 2002
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, Djambatan Jakarta, 1999
- Bushar Muhammad, *Pokok-pokok Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004
- Effendi Perangin, *Hukum Agraria di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1994
- Effendi Peranginangin, *Sari Hukum Agraria I, Konservasi Hak Atas Tanah, Landreform, Pendaftaran Tanah*, Fakultas Hukum UI, Jakarta, 2012
- Eko Yulian Isnur, *Tata cara mengurus Segala Macam Surat dan Tanah*, Yogyakarta : Pustaka Yustitia, 2012
- Hanitiyo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dsan Jurimetri*, Ghalia Indonesia Jakarta, 1992
- Irawan Soerojo, *Kepastian Hukum Atas Tanah di Indonesia*, Arkola Surabaya, 2003

- Jimmy Joses Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa Diluar Pengadilan*, Jakarta : Visimedia, 2011
- K. Wantjik Saleh, *Hak Anda Atas Tanah*, Ghalia Indonesia. 1985
- K. Wantjik Saleh, *Hak Anda Atas Tanah*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985
- Kementerian ATR/BPN Keluarkan Peraturan Sertifikat Satu Lembar *kementerian-atrbpn-keluarkan-peraturan-sertifikat-satu-lembar-- ... terbaru* tentang perubahan bentuk sertifikat hak atas tanah yang mulai berlaku. 28 Mar 2016
- Meninjau Hukum Adat *Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 1996
- MHD, Yamin Lubis dan Abd.Ralim Lubis, *Hukum Pendaftaran Tanah*, Jakarta : Mandar Maju, 2008
- Mudjiono, *Hukum Agraria*, Liberty, Yogyakarta, 1992
- Ronny Hanitiyo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dsan Jurimetri*, Ghalia Indonesia Jakarta, 1992
- Soedharyo Soimin, *Status Hak dan Pembebasan Tanah*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994
- Soedjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia. Jakarta ,1992
- Soedjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia. Jakarta 1992
- Soekanto dan Soleman B. Taneko, *Hukum Adat di Indonesia*, Rajawali Jakarta, 1986
- Surojo Wignjodipuro, *Pengantar dan Asas Hukum Adat*, Raja Grafindo, Jakarta 1990
- Wignjodipuro, Surojo. *Pengantar dan Asas – Asas Hukum Adat*. Jakarta, Gunung Agung, 1995
- Wignjodipuro, Surojo. *Pengantar dan Asas – Asas Hukum Adat*. Jakarta, Gunung Agung, 1995

**B. Peraturan Perundang – undangan antara lain :**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang- Undang Nomor 5 Tahun **1960** tentang *Peraturan Dasar Pokok Pokok-Pokok Agraria*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1961 tentang *Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah Dan Benda-Benda Yang Ada Di Atasnya*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang *Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1997 tentang *Penerimaan Negara Bukan Pajak*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1997 tentang *Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang *Jabatan Notaris.*

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1953 tentang *Penguasaan Tanah-Tanah Negara*

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1961 tentang *Pendaftaran Tanah*

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 224 Tahun 1961 tentang *Pelaksanaan Pembagian Tanah Dan Pemberian Ganti Kerugian*

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1964 Tanggal 23 Nopember 1964 tentang *Perubahan Dan Tambahan Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah Dan Pemberian Ganti Kerugian*

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1994 tentang *Pembayaran Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Atau Tanah Dan Bangunan*

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 tentang *Jenis Dan Penyeteroran Penerimaan Negara Bukan Pajak.*

Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang *Pendaftaran tanah*

Perturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang *Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah*

Peratuturan Pemerintah No.13 Tahun 2010 tentang *Pemasukan Negara Bukan Pajak*

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1997 tentang *Pembagian Hasil Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah*

Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2016 tentang *Pejabat Pembuat Akta Tanah.*

### **C. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang**

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Pengganti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1959 tentang *Penambahan Bea Balik Nama*

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1997 tentang *Penangguhan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997* tentang *Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan*

### **D. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional**

Peraturan Menteri Agraria Nomor 1 Tahun 1958 tentang *Panitia- Panitia Kerja Likwidasi Tanah-Tanah Partikelir*

Peraturan Menteri Muda Agraria Nomor 15 Tahun 1959 tentang *Pemberian Dan Pembaharuan Beberapa Hak Atas Tanah Serta Pedoman Mengenai Tata-Tjara Kerdja Bagi Pedjabat-Pedjabat Jang Bersangkutan*

Peraturan Menteri Agraria Nomor 2 Tahun 1960 tentang *Pelaksanaan Ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria*

Peraturan Menteri Agraria Nomor 4 Tahun 1961 tentang *Pelaksanaan Konversi Hak-Hak Concessie Dan Sewa Untuk Perusahaan Kebun Besar*

Peraturan Menteri Agraria Nomor 8 Tahun 1961 tentang *Peraturan Tanda-Tanda Batas Tanah-Tanah Hak.*

Peraturan Menteri Agraria Nomor 10 Tahun 1961 tentang *Penunjukan Pejabat Yang Dimaksudkan Dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah Serta Hak Dan Kewajibannya.*

Peraturan Menteri Agraria Nomor 11 Tahun 1961 tentang *Bentuk Akta*

Peraturan Menteri Agraria Nomor 13 Tahun 1961 tentang *Pelaksanaan Konversi Hak Eigendom Dan Lain-Lainnya, Yang Aktanya Belum Diganti*

Peraturan Menteri Agraria Nomor 14 Tahun 1961 tentang *Permintaan Dan Pemberian Izin Pemindahan Hak Atas Tanah*

Peraturan Menteri Agraria Nomor 15 Tahun 1961 tentang *Pembebanan Dan Pendaftaran Hypotheek Serta Credietverband*

Peraturan Menteri Agraria Nomor 4 Tahun 1964 tentang *Pedoman Penyelenggaraan Perjanjian Bagi-Hasil*

Peraturan Menteri Agraria Nomor 8 Tahun 1964 tentang *Cara Pemungutan Bagian Bagi Hasil Yang Harus Diserahkan Kepada Pemerintah Cq Panitia Landreform Kecamatan Sebagai Dimaksud Dalam Peraturan Menteri Pertanian Dan Agraria No. 4 Tahun 1964*

Peraturan Menteri Agraria Nomor 6 Tahun 1965 tentang *Pedoman-Pedoman Pokok Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Sebagaimana Diatur Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961*

Peraturan Menteri Agraria Nomor 10 Tahun 1965 tentang *Pungutan Uang Pemasukan Dan Penggantian Harga Formulir*

Peraturan Menteri Agraria Nomor 1 Tahun 1966 tentang *Pendaftaran Hak Pakai Dan Hak Pengelolaan*

Peraturan Direktur Jenderal Agraria Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 1967 tentang *Penggunaan Tanah Di Daerah Transmigrasi Dan Hak-Hak Atas Tanah Untuk Para Transmigran Dan Keluarganya*

Peraturan Direktur Jenderal Agraria Nomor 3 Tahun 1968 tentang *Pelaksanaan Peraturan Presidium Kabinet Nomor 5/Prk/1965*

Peraturan Direktur Jenderal Agraria Nomor 4 Tahun 1968 tentang *Penyelenggaraan Izin Pemindahan Hak Atas Tanah*

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1988 tentang *Penyesuaian Sertipikat Lama Dalam Rangka Penyelenggaraan Tugas Badan Pertanahan Nasional*

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1989 tentang *Papan Nama, Kop Surat Dan Stempel Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah*

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1989 tentang *Bentuk Dan Tatacara Pengisian Serta Pendaftaran Akta Pemisahan Rumah Susun*

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1989 *Tentang Tata Cara Pembuatan Surat Ukur Diluar Desa Lengkap*

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1989 tentang *Bentuk Dan Tata Cara Pembuatan Buku Tanah Serta Penerbitan Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun*

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1989 tentang *Kewenangan Penanda Tanganan Buku Tanah Dan Sertipikat*

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 1990 *Tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Guna Usaha Kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi*

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1991 tentang *Pengaturan Penguasaan Tanah Obyek Landreform Secara Swadaya*

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1991 tentang *Konsolidasi Tanah*

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1992 tentang *Tata Cara Pemungutan Uang Pemasukan Tanah-Tanah Obyek Landreform*

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1992 tentang *Biaya Pendaftaran Tanah*

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1992 tentang *Pelaksanaan Konversi Hak Atas Tanah Di Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur Dan Penerbitan Sertipikatnya*

Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1993 tentang *Tata Cara Pemberian Perpanjangan Dan*

*Pembaharuan Hak Guna Bangunan Dalam Kawasan-Kawasan Tertentu Di Propinsi Riau*

Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1993 tentang *Tata Cara Memperoleh Izin Lokasi Dan Hak Atas Tanah Bagi Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal*

Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1994 tentang *Ketentuan Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1993 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*

Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1995 tentang *Perubahan Dan Penyempurnaan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1991 Tentang Pengaturan Penguasaan Tanah Obyek Landreform Secara Swadaya*

Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1996 tentang *Formasi Pejabat Pembuat Akta Tanah.*

Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1996 tentang *Pengukuran Dan Pemetaan Untuk Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah.*

Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1996 tentang *Bentuk Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan, Akta Pemberian Hak Tanggungan, Buku Tanah Hak Tanggungan, Dan Sertipikat Hak Tanggungan.*

Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1996 tentang *Penetapan Batas Waktu Penggunaan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Untuk Menjamin Pelunasan Kredit-Kredit Tertentu.*

Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1996 tentang *Pendaftaran Hak Tanggungan.*

Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 1996 tentang *Pelimpahan Wewenang Pemberian Izin Redistribusi Tanah Obyek Pengaturan Penguasaan Tanah*

Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 1996 tentang *Persyaratan Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing*

Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 1996 tentang *Perubahan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Persyaratan Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing*

Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang *Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.*

Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1998 tentang *Pelimpahan Wewenang Pengangkatan Dan Pemberhentian Camat Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah*

Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1998 tentang *Surveyor Berlisensi*

Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1998 tentang *Pedoman Penetapan Uang Pemasukan Dalam Pemberian Hak Atas Tanah Negara*

Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1998 tentang *Perubahan Hak Guna Bangunan Atau Hak Pakai Atas Tanah Untuk Rumah Tinggal Yang Dibebani Hak Tanggungan Menjadi Hak Milik*

Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 1998 tentang *Perubahan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Pedoman Penetapan Uang Pemasukan Dalam Pemberian Hak Atas Tanah Negara*

Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 1998 tentang *Kewenangan Menandatangani Buku Tanah, Surat Ukur Dan Sertipikat.*

Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1999 tentang *Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan*

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang *izin lokasi*

Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang *Pelimpahan Kewenangan Pemberian Dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara*



Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1999 tentang *Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah*

Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang *Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat*

Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 1999 tentang *Tata Cara Pendaftaran Perubahan Data Pendaftaran Tanah Yang Menyangkut Aset Dalam Restrukturisasi Dan Atau Kewajiban Dalam Restrukturisasi Yang Berupa Hak Atas Tanah Yang Sudah Bersertipikat Dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun*

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang *Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan.*

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang *Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah*

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2006 tentang *Pola Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.*

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang *Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia + Lampiran.*

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 Tentang *Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Dan Kantor Pertanahan.*

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2006 tentang *Mekanisme Dan Tata Kerja Staf Khusus Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.*

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang *Tata Cara Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Dilingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Inonesia*

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 tentang *Penyelenggaraan Hubungan Dan Kerjasama Luar Negeri Di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia*

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang *Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2007 tentang *Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Dan Pembiayaan Reforma Agraria Nasional*

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2007 tentang *Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Dan Pembiayaan Reforma Agraria Regional, Cabang Dan Ranting*

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 tentang *Standar Pelayanan Minimal Bagi Badan Pengelolaan Dan Pembiayaan Reforma Agraria Nasional*

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2007 tentang *Panitia Pemeriksaan Tanah*

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2007 tentang *Organisasi Dan Tata Kerja Pusat Pengelolaan Reforma Agraria Nasional*

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang *Pembentukan Perwakilan Kantor Pertanahan Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur*

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang *Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Usaha Mikro Dan Kecil Melalui Kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Untuk Peningkatan Akses Permodalan*

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2008 tentang *Uraian Tugas Subbagian, Seksi Dan Subbidang Dilingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia*

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2008 tentang *Uraian Tugas Subbagian Dan Seksi Pada Kantor*

*Wilayah Badan Pertanahan Nasional Dan Uraian Tugas Urusan Dan Subseksi Pada Kantor Pertanahan*

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang *Penyederhanaan Dan Percepatan Standar Prosedur Operasi Pengaturan Dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan Pertanahan Tertentu*

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang *Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Usaha Mikro Dan Kecil Melalui Kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Untuk Peningkatan Akses Permodalan*

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang *Pembentukan Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara*

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 tentang *Pembentukan Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Buton Utara Provinsi Sulawesi Tenggara*

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang *Pembentukan Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Tengah Provinsi Nusa Tenggara Timur*

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang *Pembentukan Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat Daya Provinsi Nusa Tenggara Timur*

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 tentang *Pembentukan Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Nagekeo Provinsi Nusa Tenggara Timur*

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 tentang *Pembentukan Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu*

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2009 tentang *Pembentukan Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau*

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang *Pembentukan Perwakilan Kantor Pertanahan Kota Surabaya Di Provinsi Jawa Timur*

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 tentang *Larasita Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia*

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2009 tentang *Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah*

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang *Standar Pelayanan Dan Pengaturan Pertanahan*

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2010 tentang *Penanganan Pengaduan Masyarakat*

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 tentang *Loket Pelayanan Pertanahan*

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang *Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar (sudah termasuk lampiran)*

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang *Penanganan Bencana Dan Pengembalian Hak-Hak Masyarakat Atas Aset Tanah Di Wilayah Bencana*

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang *Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia*

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang *Penghargaan Di Bidang Pertanahan*

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2010 tentang *Satuan Pelaksana Pengendalian Intern Di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia*

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang *Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah Dan Kegiatan Pendaftaran Tanah Tertentu*

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang *Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi Dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah*

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian Dan Penanganan Kasus Pertanahan

**E. Jurnal/Artikel Ilmiah/Internet**

Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Badan Pertanahan Nasional

*[jdih.ristekdikti.go.id/?q=system/files/perundangan/1282171363](http://jdih.ristekdikti.go.id/?q=system/files/perundangan/1282171363)*

Daimon, *Sengketa Tanah* (online), <http://www.damang.web.id,2011>

Kementerian Agraria dan Tata Ruang BPN, *Penanganan Kasus Pertahanan*, Badan Pertanahan Nasional, <http://www.bpn.go.id> (online) 2016

Mipo, B, *Sengketa Kepemilikan Tanah* (online), <http://www.hukumonline.com.2016>

Revisi PP, Pemerintah Perketat Persyaratan Menjadi Pejabat Pembuat Akta Tanah Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Oleh: **Humas** ; Diposkan pada: **12 Jul 2016 ; 21708 Views** [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com) > Home > 2016 *[jdih.ristekdikti.go.id/?q=system/files/perundangan/1282171363](http://jdih.ristekdikti.go.id/?q=system/files/perundangan/1282171363)*

Wilayah Kerja PPAT Menjadi 1 Propinsi sesuai dengan PP No.24 Tahun 2016 *[irmadevita.com/2016/wilayah-kerja-ppat-menjadi-1-propinsi](http://irmadevita.com/2016/wilayah-kerja-ppat-menjadi-1-propinsi)*. Soerjono Soekanto, *Pengertian Sosialisasi*. (Artikel Internet- agustus 2016) [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com) > Home > 2016